

Menakar Fungsi Organisasi Perempuan Dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Dwi Astuti

Sosiologi, FISIPOL, Universitas Widya Mataram
(Diterima 30-04-2021; Disetujui 27-05-2021)
dwiastuti@gmail.com

Abstract

Women's organization are one of the instrument that are considered capable to fighting for gender equality. However, it was found that many women's organization were have wrong interpreting about the role of their existence. So, even though women's organization have been active for decades, they have not had a significant impact on efforts for gender equality in Indonesia. This can be seen from the low gender development index in Indonesia compared to several countries in the world. This study aims to look at and reflect the existence of women's organization in Indonesia, and try to identify what important aspect of women's organization that affect gender equality. This research uses descriptive qualitative method. The key to reach the success of women's organization in striving for gender equality lies in the perspective and on the program of women's organization in understanding their roles. There are many women's organization in Indonesia with various forms, activities and membership backgrounds. However, whatever the form of organization and its field work, the key to success in realizing gender equality, is when women's organization focus on identifying women's needs, reflecting and reconstructing patriarchal hegemony, strengthening skill and knowledge, increasing access to policies, empowering women, networking and knowing women's issues in the global realism.

Kata kunci: Organisasi Perempuan, Kesetaraan Gender

Abstrak

Organisasi perempuan merupakan salah satu wadah atau sarana yang dianggap mampu memperjuangkan kesetaraan gender. Namun ditemukan bahwa banyak organisasi perempuan justru salah dalam memaknai peran akan keberadaannya. Sehingga meskipun organisasi perempuan sudah berkiprah selama puluhan tahun namun tidak memberikan dampak yang besar bagi upaya kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari masih rendahnya indeks pembangunan gender di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di dunia bahkan di Asean. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kunci keberhasilan organisasi perempuan dalam mengupayakan kesetaraan gender terletak pada perspektif atau sudut pandang dari organisasi perempuan dalam memahami perannya. Ada banyak organisasi perempuan di Indonesia dengan berbagai bentuk, jenis kegiatan dan latar belakang keanggotaan. Namun apa pun bentuk organisasi dan bidang kerjanya, kunci keberhasilan organisasi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender antara lain adalah ketika organisasi perempuan itu berfokus kepada identifikasi kebutuhan perempuan, merefleksi dan merekonstruksi hegemoni patriarki, menguatkan ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan akses terhadap kebijakan, berorientasi pemberdayaan, berjejaring dan mengenal isu persoalan perempuan di ranah global.

Kata Kunci: Organisasi Perempuan, Kesetaraan Gender

PENDAHULUAN

Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Banyak program pemerintah telah ditetapkan sebagai bentuk penguatan atau pemberdayaan perempuan di Indonesia. Upaya pemberdayaan perempuan dilakukan setelah disadari dan diakui bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tertentu yaitu kelompok perempuan. Beberapa persoalan yang dihadapi adalah perlakuan ketidakadilan kepada perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik dan ekonomi. Lebih jauh dari itu, perempuan di Indonesia juga berhadapan dengan berbagai persoalan kekerasan mulai dari kekerasan verbal, kekerasan fisik bahkan sampai kekerasan seksual. Budaya patriarki dianggap memiliki aspek yang kuat menyebabkan berbagai persoalan perempuan ini.

Budaya patriarki menempatkan perempuan dalam posisi nomor dua (sub-ordinasi) dalam berbagai aspek pembangunan. Dengan kondisi ini, maka cara untuk menyelesaikan permasalahan perempuan adalah dengan menaikkan posisi tawar perempuan. Banyak strategi ditempuh untuk meningkatkan posisi tawar perempuan baik berbagai penyuluhan, pelatihan, penyadaran dan tidak kalah penting dari itu adalah pengorganisasian perempuan. Penyelesaian masalah perempuan akan semakin efektif jika perempuan berorganisasi yaitu berkelompok sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang sama. Organisasi perempuan merupakan salah satu solusi permasalahan perempuan dan upaya mewujudkan kesetaraan gender. Keberadaan organisasi perempuan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Konteks masyarakat dibawah kolonialisme dianggap sangat berpengaruh terhadap kemunculan awal berbagai organisasi perempuan di Indonesia. Organisasi perempuan pertama dibentuk tahun 1912 yaitu organisasi perempuan bernama Poetri Merdeka. Pembentukan organisasi perempuan pertama ini sangat dekat dengan tujuan organisasi Budi Oetomo, yaitu memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain itu yang menjadi fokus dari organisasi perempuan Poetri Merdeka adalah kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan dan penyelesaian persoalan perkawinan.¹ Secara garis besar ada empat fase atau masa pergerakan organisasi perempuan di Indonesia, yaitu : masa Kartini hingga masa kemerdekaan 1945, masa setelah kemerdekaan sampai 1965, pada masa awal Orde Baru sampai 1998 dan terakhir adalah tahun 1998 sampai saat ini.² Jika dilihat dari peran dan fungsinya maka pergerakan organisasi perempuan juga mengalami perubahan dari masa ke masa. Tidak disangsikan lagi bahwa keberadaan organisasi perempuan di Indonesia sudah sangat lama. Namun sebagai salah satu strategi dalam upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia dan upaya menciptakan kesetaraan gender, ternyata keberadaan organisasi perempuan ini tidak serta merta memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari indikator berupa Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender. Indeks Pembangunan Gender adalah ukuran keberhasilan pembangunan dilihat dari sisi kesetaraan atau keseimbangan antara indeks pembangunan laki-laki dan indeks pembangunan perempuan dalam suatu negara. Sementara itu Indeks Ketimpangan Gender adalah indikator pembangunan yang dilihat dari tingkat kesenjangan atau ketidakadilan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender dilihat dari aspek keterlibatan perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Secara nasional Indeks Pembangunan Gender di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Capaian Indeks Pembangunan Gender di Indonesia tahun 2018 sebesar 72,10, sementara itu tahun 2019 sebesar 91,07 dan tahun 2020 sebesar 91,06.³ Jika dilihat dari data tersebut, memang terlihat bahwa indeks pembangunan gender di Indonesia mengalami peningkatan terus menerus dari tahun ke tahun. Dan angka kesetaraan gender yang dicapai saat ini juga cukup tinggi. Untuk melengkapi pemahaman kita tentang kondisi kesetaraan gender yang ada di Indonesia, kita juga perlu memahami fenomena masih terdapatnya ketimpangan gender di Indonesia. Pada tahun 2017, angka ketimpangan gender yang ada di Indonesia berada pada angka 0,453 dan berada pada urutan kelima jika dibandingkan dengan negara Asean dan beberapa negara lain di dunia. Bahkan Indeks Ketimpangan Gender Indonesia berada pada urutan keempat untuk negara Asean.⁴ Indeks ketimpangan gender ini dilihat dari empat aspek antara lain kesehatan, pendidikan, akses ekonomi. Semakin tinggi indeks ketimpangan gender maka menunjukkan semakin tinggi ketimpangan capaian antara laki-laki dan perempuan dan semakin rendah kesetaraan gender.⁵ Selain dilihat dari indeks pembangunan gender dan indeks ketimpangan gender, persoalan perempuan di Indonesia juga bisa dilihat dari beberapa aspek antara lain masih tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan

¹ Mursidah, Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia dan Bingkai Sejarah, MUWAZÂH, Volume. 4, Nomor. 1, Juli 2012, 87-103. P.90.

² Jasmine Floretta, Empat Fase Gerakan Perempuan Indonesia dan Apa Yang Bisa Kita Pelajari Darinya, MAGDALENE, 17 Desember 2020, <https://magdalene.co/story/4-fase-gerakan-perempuan-di-indonesia-dan-apa-yang-bisa-kita-pelajari-darinya#>, diakses 24 April 2021.

³ Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020. P.V.

⁴ Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018, p.18.

⁵ Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender 2018 (Kajian Lanjutan 2), Badan Pusat Statistik, 2019, p. 14.

berbasis gender. Komnas Perempuan mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 terjadi kasus kekerasan sebanyak 299.911 kasus. Ada tiga ruang yang dicatat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan berbasis gender yaitu *pertama*, ruang personal, yang biasanya terdiri dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran dan kekerasan terhadap anak perempuan. *kedua*, ruang publik/komunitas yang sebagian besar adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai komunitas seperti di masyarakat, tempat kerja, dan lain-lain. *Ketiga*, ruang masyarakat di mana negara sebagai pelakunya. Dari ketiga ruang kekerasan terhadap perempuan ini yang paling tinggi adalah kekerasan yang terjadi pada ruang personal (71%), kemudian kekerasan pada ruang komunitas (21%) dan kekerasan oleh negara (0,1%).⁶

Dari beberapa fakta di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak persoalan yang dialami perempuan terkait dengan persoalan kesetaraan gender. Menjadi menarik untuk dikaji tentang peran dan pengaruh organisasi perempuan yang ada di Indonesia terhadap penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di Indonesia. Atau dengan kata lain sejauh mana organisasi perempuan mampu menciptakan kesetaraan gender sebagai dan menyelesaikan berbagai sumber permasalahan yang dihadapi perempuan di Indonesia. Lebih jauh menarik untuk mengkaji dan menemukan format organisasi perempuan seperti apa yang dianggap efektif dalam menciptakan kesetaraan gender dan mengatasi berbagai persoalan perempuan di Indonesia.

METODE

Untuk menjawab persoalan penelitian di atas penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan analisis diskriptif kualitatif. Yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah organisasi perempuan yang pernah ada di Indonesia dilihat dari aspek sejarah (lamanya organisasi perempuan terbentuk di Indonesia sampai sekarang), latar belakang jenis dan keanggotaan, dan yang terutama mengkaji tujuan, peran dan fungsinya dalam menciptakan kesetaraan gender di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Sejarah dan Perkembangan Organisasi Perempuan di Indonesia.

Perkembangan pergerakan perempuan Indonesia melalui organisasi tidak berdiri terlepas dari konteks lokal dan konteks global. Perkembangan isu kesetaraan gender di masyarakat global bersandingan dengan kesadaran akan adanya ketidakadilan dari struktur sosial yang patriarki, posisi laki-laki dan perempuan yang timpang, merupakan dasar berkembangnya berbagai organisasi perempuan di Indonesia. Tentu saja dengan tujuan untuk meningkatkan posisi kesetaraan wanita dengan pria.⁷ Ada beberapa pendapat berkaitan dengan munculnya organisasi wanita ini. *Pertama*, ini ada hubungannya dengan perbedaan peranan antara pria dan wanita. (sex role differentiation). Maksudnya adalah bahwa peranan kaum wanita dan pria memang sudah dibedakan. Dalam perkembangan masyarakat perbedaan peran itu semakin kompleks, semakin kabur dan sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Misalnya : dalam masyarakat sekarang sudah tidak lagi dibedakan dengan tegas antara profesi untuk perempuan dan profesi untuk pria, juga penerapan pembagian peran ini berbeda-beda antara orang Jawa dengan orang Bali, namun diferensiasi sebagai pria dan wanita itu (sex differentiation) tetap ada. *Kedua*, berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan Robert Bierstedt, menyebutkan bahwa dalam pergaulan pria dan wanita sering terjadi pemisahan diri. Walaupun mereka berada dalam pertemuan-pertemuan, kelompok-kelompok, pekerjaan-pekerjaan yang dihadiri pria dan wanita namun pada kenyataannya selalu dengan sendirinya wanita memisahkan diri dengan pria. Dan pria memisahkan diri dengan wanita. *Ketiga*, adalah pendapat dari Gidding, meskipun diskriminasi peran pria dan wanita sudah tidak jelas lagi namun pengelompokan pria dan wanita tetap ada. Hal ini disebabkan oleh adanya *consciousness of kind*. (kesadaran akan jenis/elompok tertentu). *Keempat*, pendapat yang dikemukakan oleh Sorokin, yang mengatakan bahwa hubungan antara pria dan wanita bervariasi antara persamaan (equality) dan

⁶ CATAHU 2020 Komnas Perempuan : Lembar Fakta dan Point Kunci 2021, Komnas Perempuan, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. Diakses 26 April 2021, jam : 11:22 PM.

⁷ Syahrul Amar, Perjuangan Gender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX, Fajar Histeria, Vol. 1, No.2, Desember 2017, 105-119, p.110.

perbedaan (inequality). Jika golongan wanita mempunyai kedudukan yang tidak begitu menguntungkan sedangkan pria mempunyai hak yang istimewa maka itu berakibat timbulnya antagonisme. Antagonisme ini menimbulkan emansipasi. Merasakan suatu solidaritas senasib. Organisasi merupakan fungsi *manage* atau mengelola dengan cara menghimpun orang-orang, materi dengan metode-metode untuk mencapai tujuan tertentu.⁸ Menurut teori sosiologi organisasi wanita tergolong kelompok formal yang didirikan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Biasanya mempunyai peraturan-peraturan tentang cara bekerja, mempunyai sistem kepemimpinan dan anggota-anggotanya mempunyai kepentingan yang sama. Pengertian organisasi adalah sama dengan *women's organization*.⁹ Sebuah asrama wanita atau sekolah kepandaian putri juga merupakan kelompok formal tetapi kedua lembaga itu bukanlah organisasi wanita. Karena dalam organisasi wanita ada unsur pengabdian pada suatu usaha bersama atau cita-cita untuk suatu kepentingan yang diluar kepentingan pribadi. Definisi lain dari organisasi adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk karena ada kepentingan bersama. Mac Iver dan Page menggunakan istilah *association*. Sementara Sorokin memberikan uraiannya tentang organisasi sebagai *organized group* dimana anggota-anggota mengadakan interaksi berdasarkan arti-norma-nilai tertentu. Orang-orang yang memiliki kesamaan arti-norma-nilai itu bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi untuk melaksanakan dan mencapai kepentingannya.¹⁰ Dalam keanggotannya organisasi wanita ada yang bersifat *voluntary association* dan *compulsary association*. *Voluntary association* adalah organisasi yang keanggotannya bersifat sukarela. Misalnya : organisasi hobi, organisasi berdasarkan profesi, organisasi politik dsb. Sementara *compulsary association* adalah organisasi yang keanggotannya bersifat diwajibkan /otomaitis. Misalnya: organisasi berdasar kelahiran, organisasi berdasar tempat tinggal, organisasi keagamaan dsb.

Sama dengan organisasi lain, organisasi wanita juga bergerak semakin demokratis. Dalam arti semakin sebuah negara demokartis, menghargai dan menjamin kebebasan individu maka semakin bersifat *voluntary association*. Namun pengelolaannya menjadi semakin profesioanl. Mac Iver mengatakan bahwa dalam masyarakat yang kompleks organisasi-organisasi lebih khusus dan lebih beraneka ragam jika dibandingkan dengan organisasi yang ada dalam masyarakat tradisional. Demikian juga dengan pertumbuhan gerakan wanita di Indonesia sejajar dengan pergerakan kemerdekaan nasional, Menurut Turner dan Killian, cara-cara perjuangan sesuatu gerakan sosial selalu sesuai dengan nilai-nilainya, maka cara-cara yang dipakai oleh pergerakan wanita dewasa ini sesuai juga dengan nilai-nilai yang dipupuk selama pergerakan kemerdekaan yaitu persatuan bangsa. Berikut gambaran perkembangan organisasi wanita di Indonesia, sebagai adaptasinya terhadap kondisi kehidupan sosial dan politik masyarakat, dimana organisasi itu berada:

| Tahun | Karakteristik Organisasi Wanita | Contoh |
|-------------|---|--|
| 1912 - 1923 | Merupakan masyarakat jajahan, bangkitnya kesadaran nasional, sifat organisasi wanita umum, keanggotaan sukarela, tujuan untuk memupuk kesadaran harga diri sebagai bangsa dan pendidikan ketidakadilan. | Putri Mardika (BU), Aisyiyah Yogyakarta, Wanito Susilo, dll. |
| 1928-1942 | Masa pendudukan Jepang, organisasi nasional dilarang, organisasi wanita tetap berlangsung tanpa lembaga, keanggotaan wajib untuk istri pamongpraja dan sukarela untuk umum. | Perwani, Gerakan Perempuan Islam Indonesia. |
| 1945-1950 | Masa revolusi fisik, semangat perjuangan kemerdekaan, organisasi wanita membantu dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan juga hubungan luar negeri. | Barisan Buruh Wanita, Jalasenastri, Persatuan wanita Murba. |

⁸ Tiara Tane, Fatmariza, Peran Organisasi Perempuan dalam Pembangunan : Studi di Nagari Canduang Koto Laweh, *Journal of Civic Education*, Vol. 3 No. 4 2020, 367-375, p.372.

⁹ Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, Rajawali dan Yayasan Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 1984

¹⁰ Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, Rajawali dan Yayasan Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 1984

| | | |
|-----------|--|--|
| 1950-1959 | Permulaan kemerdekaan, demokrasi liberal, organisasi wanita banyak berdiri di berbagai bidang dan profesi, tujuan utama meninggikan derajat wanita, pengabdian masyarakat dan kesejahteraan keluarga. | Ikatan Istri Karyawan, dsb |
| 1966-1975 | Pemerintahan Orba,, demokrasi Pancasila, banyak organisasi wanita didirikan dengan tujuan khusus dan menurut profesi, keanggotaan sukarela dan otomatis (organisasi sipil dan dinas diintegrasikan). Tujuan partisipasi dalam pembangunan nasional, kesejahteraan keluarga dan meninggikan derajat wanita. | Dharma Wanita, dalam berbagai dinas dsb. |

11

Berbagai organisasi bersifat perempuan berkembang dalam masyarakat kita. Ada organisasi perempuan terkait dengan profesi, agama, seni, politik sampai hobi. Alasan mendirikan organisasi itu pun bermacam-macam. Ada yang mengatakan alasan bergabung dengan organisasi perempuan adalah karena banyak cita-cita, harapan dan tujuan serta keinginan perempuan untuk mensejahterakan kaum perempuan, atau ingin adanya keterlibatan dan pengakuan perempuan sehingga perempuan perlu menyamakan persepsi. Disebut organisasi perempuan karena organisasi itu memang beranggotakan perempuan. Yang perlu diperhatikan adalah apakah betul kehadiran organisasi perempuan tersebut bisa menjadi pemecahan masalah bagi diskriminasi perempuan dalam pembangunan? Atau lebih jauh lagi apakah organisasi perempuan tersebut bisa membawa perubahan sosial/transformatasi sosial hubungan antara laki-laki dan perempuan?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, kita akan melihat dan memperhatikan adanya tiga tipe organisasi perempuan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut antara lain berkaitan dengan fokus kegiatan, latar belakang pendirian dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

a. Organisasi Perempuan Pecinta Batik. dsb

Organisasi seperti ini dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan dalam hobi/kesenangan. Tujuan dari organisasi seperti ini adalah untuk saling membagi pengalaman dan wawasan dalam hal hobi/kesenangan mereka. Kegiatan yang dilakukan pun biasanya hanya bersifat rekreatif untuk kesenangan, untuk ekspresi diri atau untuk refreshing (sesaat melepaskan diri) dari kesibukan sehari-hari.

b. PKK, Posyandu, Dasa Wisma. Dharma Wanita.

Jika melihat dari latar belakang berdirinya, organisasi perempuan dalam kategori ini berdiri untuk menjadi perpanjangan tangan berbagai program pemerintah. Sejak Orde Baru, dibawah slogan "partisipasi masyarakat" pemerintah membentuk organisasi di setiap wilayah, agar bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Organisasi ini memiliki kepengurusan yang cukup rapi, memiliki fokus kegiatan yang jelas yaitu menjalankan program-program yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, pemberian makanan tambahan, penimbangan balita dan wanita hamil, pengisian buku menuju sehat untuk balita dan ibu hamil, sosialisasi keluarga berencana dan sebagainya. Selain kegiatan yang berkaitan dengan program-program pemerintah, organisasi ini juga melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan ketrampilan dan menambah wawasan. Bagi anggotanya sendiri, terkadang keterlibatan dalam organisasi ini yang terutama bukan untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan tetapi lebih sebagai wahana untuk mengekspresikan diri, saling berbagi antar sesama perempuan dan untuk refreshing (melepaskan diri sementara) dari kesibukan sehari-hari. Ada ungkapan pada beberapa perempuan bahwa "keluar rumah berarti beristirahat". karena ketika perempuan pulang dan masuk rumah itu berarti pekerjaan dan kesibukan yang tiada henti.

Walaupun organisasi ini cukup mewakili wajah partisipasi perempuan dalam pembangunan, namun signifikansinya untuk memecahkan persoalan-persoalan perempuan perlu diperhatikan. Dalam masyarakat-masyarakat yang sudah tidak begitu membutuhkan pelayanan-pelayanan seperti diatas,

¹¹ Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, Rajawali dan Yayasan Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 1984

misalnya masyarakat menengah keatas organisasi ini tetap ada. Namun kegiatannya kemudian hanya difokuskan pada kegiatan yang bersifat rekreatif, untuk membangun solidaritas saja. Misalnya : PKK di kota-kota atau di perumahan-perumahan.

c. Solidaritas Perempuan, Himpunan Pengusaha Wanita Indonesia.

Organisasi seperti ini juga memiliki struktur organisasi yang jelas, tujuan kegiatan yang jelas dan bahkan memiliki rencana strategis untuk mencapai tujuan mereka. Organisasi seperti ini berdiri dilatar belakang oleh persoalan-persoalan perempuan. Fokus dan tujuan kegiatan dari organisasi ini adalah memperjuangkan hak-hak perempuan dan menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan. Organisasi nir-laba yang bergerak dalam bidang perempuan bisa masuk dalam kategori ini. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi ini terutama berkaitan dengan penyelesaian masalah-masalah perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan, namun demikian juga membuka kemungkinan adanya kegiatan yang bertujuan untuk menambah ketrampilan, menambah wawasan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan perempuan. Organisasi seperti ini cenderung lepas dari program-program pemerintah, dan menempatkan pemerintah sebagai *stakeholder* untuk mendukung keberhasilan program-program yang telah mereka tetapkan.

Organisasi Perempuan dalam Perspektif Kesetaraan Gender.

Dalam tulisannya, Julia Cleves Mosse menyampaikan apa fungsi dari berbagai organisasi perempuan. Dalam tulisannya tersebut Julia, mengidentifikasi berbagai fungsi organisasi perempuan yang ditemukan oleh DWAN (Development, Crises and Alternative Visions). Sekurang-kurangnya ada enam macam organisasi berbeda, mulai dari yang sangat tradisional hingga organisasi dengan analisis dan agenda feminis khusus. *Pertama*, organisasi perempuan tradisional. Biasanya umur organisasi ini sudah tua. Cenderung berkuat diseperti peran gender tradisional, meski membuat prestasi penting dalam hal pendidikan, kesehatan dan pelayanan terkait dua hal tersebut. Sebagian besar didukung perempuan kelas menengah dan memiliki pendekatan patron pada perempuan miskin. Kekuatannya terletak pada akses mereka terhadap sumber daya dan pembuat keputusan, meskipun mereka mungkin tidak pernah memanfaatkan hubungan ini. *Kedua*, organisasi yang berafiliasi dengan partai politik (mis : ANC di Afrika Selatan). Organisasi ini cenderung sibuk dalam memecahkan persoalan dalam menegaskan agendanya sendiri, yang bersumber dari image mereka yang dianggap memecah belah/menggunggat status quo. *Ketiga*, organisasi berbasis pekerja, serikat buruh dalam sektor formal, organisasi wirausaha perempuan miskin. Masalah-masalah yang mereka jadikan fokus perhatian adalah masalah kondisi kerja, tersedianya kredit, tetapi kemudian juga melangkah ke isu feminis secara lebih eksplisit seperti pelecehan seksual dan sebagainya. Organisasi semacam ini dianggap berhasil memberdayakan perempuan secara pribadi. *Keempat*, organisasi-organisasi yang muncul dari pendanaan proyek, seperti koperasi kredit, peningkatan pendapatan dan inisiatif-inisiatif untuk perempuan miskin. Organisasi seperti ini memiliki pendekatan top-down. *Kelima*, organisasi kelompok akar rumput, namun masih juga berkaitan dengan proyek-proyek khusus, seperti kesehatan, pemberantasan buta huruf, kekerasan, hukum dan persoalan politik dari sudut pandang feminis. Kelemahan dari organisasi ini adalah sifatnya yang top-down dan memiliki sumber daya yang terbatas. Namun mereka yang benar-benar bisa membangun jaringan dengan perempuan miskin pasti lebih berhasil. *Keenam*, organisasi penelitian dan sumber daya. Organisasi ini bekerja pada lini mempengaruhi perdebatan kebijakan umum dan memberi masukan kepada pemerintah dan pemberi dana internasional.¹²

Jika kita perhatikan dari tiga contoh organisasi diatas dan enam yang lainnya, maka bisa disimpulkan adanya bermacam-macam organisasi perempuan dilihat dari latar belakang berdirinya, fokus kegiatannya dan tujuan berdirinya. Latar belakang berdirinya organisasi bisa muncul dari kebutuhan perempuan itu sendiri atau juga bisa merupakan bentukan, khususnya pemerintah. Dari berbagai fokus kegiatannya, ada yang fokusnya pada persoalan-persoalan substansial perempuan tetapi ada juga yang fokusnya hanya pada wahana untuk membangun solidaritas semata. Dan dilihat dari tujuan organisasinya, ada organisasi yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kaitannya dengan persoalan diskriminasi dan ada

¹² Julia Cleves Mosse, Gender dan Pembangunan, Rifka Nissa Women Crisis Center & Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, p.236-238.

organisasi yang tujuannya hanya untuk membangun solidaritas semata. Namun pertanyaannya, apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan perempuan dalam organisasi ini benar-benar bisa menyelesaikan persoalan nyata perempuan? Jika kita perhatikan, yang paling memprihatinkan adalah organisasi bentukan pemerintah (seperti PKK, Dasa Wisma, dll) karena ada ketidakadilan dalam keberadaannya, disitu perempuan jelas memberikan kontribusi terhadap pembangunan tetapi apa kontribusi pembangunan terhadap perempuan, khususnya dalam menyelesaikan lima persoalan diskriminasi diatas.¹³

Keberhasilan organisasi wanita sebagai sebuah gerakan sosial ditentukan oleh *social power* yang dimilikinya sementara itu *social power* ini bersumber pada tiga hal.:

1. Jumlah anggota,
2. Organisasi,
3. Sumber kekayaan, seperti uang, pengetahuan, keterampilan, kepandaian, dll.

Ketiganya merupakan sumber kekuasaan sosial yang dimiliki oleh organisasi. Adakalanya sebuah organisasi mempunyai cukup gengsi dan posisi akan tetapi ini tidak berarti bahwa dengan sendirinya mempunyai kekuasaan, karena seorang atau suatu golongan benar-benar mempunyai suatu kekuasaan jika dapat melaksanakan kehendaknya kepada orang atau golongan lain dengan sanksi-sanksi. Jika tidak maka itu belum merupakan kekuasaan tetapi hanya pengaruh. Dengan pengaruhnya itu suatu organisasi dapat melakukan desakan kepada golongan lain.

Pengelolaan yang efektif dan efisien, atau pengelolaan yang baik terhadap seluruh potensi sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi, adalah kunci kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuannya dan dalam mengatasi segala perubahan yang ada. Kunci keberhasilan organisasi yang lain yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah komitmen organisasi terhadap tujuan dan komitmen dari anggota-anggotanya.¹⁴

Jika kita perhatikan, pertanyaan diatas paling sesuai jika kita hubungkan dengan organisasi perempuan yang kedua, seperti PKK, Posyandu, Dharma Wanita dll. Dalam tulisan Julia berhubungan dengan organisasi bentuk pertama, keempat dan kelima. Organisasi ini memang keberadaannya berawal dari program-program pemerintah. Namun ada persoalan perbedaan pemahaman yang sesungguhnya merugikan perempuan, namun lagi-lagi tidak disadari oleh perempuan. Bagi anggota organisasi ini, mereka merasa dengan keterlibatan mereka dalam organisasi menunjukkan eksistensi dan partisipasi mereka dalam pembangunan, bagi pemerintah sendiri keberadaan organisasi ini sangat penting dan menentukan dalam program-program mereka. Tetapi tidak ada hasil nyata dalam memperjuangkan permasalahan-permasalahan perempuan dan kesejajaran laki-laki dan perempuan. Jika memperhatikan sejarah panjang pergerakan organisasi perempuan di Indonesia maka cukup menggembirakan, dimana organisasi perempuan memiliki tujuan dan peran dalam masyarakat, dalam pembangunan bahkan dalam mencapai kemerdekaan. Namun kondisi mulai berubah sejak Orde Baru tahun 1965. Orde Baru ditengarai sebagai masa dimana pemerintah sangat berorientasi kepada kapitalisme, dan berdampak kepada beberapa pemikiran kritis yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini juga berdampak kepada organisasi perempuan. Hal ini berdampak pada kebijakan pemerintah yang lebih banyak mengarahkan organisasi perempuan pada aktifitas-aktifitas yang sifatnya domestik, yaitu perempuan sebagai istri. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita, Dharmai Pertiwi dan sebagainya, dimana aktifitasnya lebih banyak digunakan untuk menunjang dan mendukung program-program pemerintah, dan bergerak di ranah domestik. Kegiatan-kegiatan organisasi perempuan sudah diarahkan dan ditetapkan hanya untuk bergerak di ranah domestik.¹⁵

Undang-undang perkawinan lahir pada masa Orde Baru, sebagai bentuk perlindungan terhadap praktek poligami. Hal ini bisa dilihat sebagai arah positif dari kesetaraan gender. Namun pada saat yang sama Orde Baru juga membawa angin kesetaraan gender di Indonesia ke arah yang negatif,

¹³ Rosalia, Sciortino, Menuju Kesehatan Madani, Pustaka pelajar dan Yayasan Galang, Yogyakarta, 1999, p. 237.

¹⁴ Richard, Ridolof & Amran, Peran Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Tenaga Keperawatan Pada Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), 912) 2, Desember 2020, 79-86, p.79.

¹⁵ Mursidah, Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah, MUWÂZÂH, Volume. 4, Nomor. 1, Juli 2012, 87-103, p.92.

yaitu dengan melakukan reproduksi superioritas laki-laki dan suobordinasi posisi perempuan. yang ditandai dengan adanya instruksi tentang pendidiran berbagai organsiasi istri dan PKK, yang pemaknaan keberadannya adalah menegaskan peosisi perempuan hanya sebagai istri.¹⁶

Jika memperhatikan efektifitas dan kekuatan organisasi untuk bisa membawa perubahan, maka salah satunya adalah jumlah anggota dan kekuatan organisasi yang dimiliki. Organisasi perempuan yang sangat masif dan ada di semua lini adalah PKK singakatan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Organisasi ini awalnya memiliki akronim Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Perubahan akronim yang terjadi pada tahun 1999. Tujuan dari perubahan itu adalah untuk lebih menonjolkan peran PKK sebagai agen pemberdayaan perempuan dan agen mewujudkan kemitrasejajaran antara laki-laki dan wanita.¹⁷ Organisasi PKK jika dilihat dari peran dan fungsi yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah memang merupakan organisasi yang memiliki potensi menjadi wadah mewujudkan pemberdayaan perempuan. Namun kenyataannya hasilnya belum maksimal karena belum mampu mewujudkan kemitrasejajaran anatra laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan semua anggota PKK kebanyakan adalah istri tidak bekerja dan pensiunan, yang *nota bene* tidak mampu mengangkat posisi tawar mereka.¹⁸ Jika mengacu pada persoalan kesetaraan gender, semestinya ada dua alasan mengapa perempuan itu penting untuk berorganisasi. Yang *pertama* adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang lekat dengan kehidupan perempuan, *kedua* untuk penyadaran akan posisi perempuan dan kesetaraan gender. Selama masa Orde Baru organisasi perempuan berkembang dalam hal kuantitas namun mengalami kemunduran dalam hal kualitas, khususnya terkait upaya kesetaraan gender. Upaya organisasi perempuan tidak fokus kepada dua tujuan tersebut, namun lebih menekankan simbol atau aspek *ceremonial* belaka. Seperti yang terjadi pada PKK, organisasi istri pegawai dan sebagainya. Jika organisasi perempuan ingin mencapai kondisi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender maka agenda utama mereka adalah penyelesaian persoalan-persoalan perempuan sesuai dengan relitas sosial dimana mereka berada, dan pemetaan kekuatan organisasi perempuan sebagai wadah upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.¹⁹ Tidak seluruh organisasi perempuan yang ada di Indonesia ini, menunjukkan kegagalan dalam proses melakukan pemberdayaan perempuan. Ada beberapa organisasi perempuan yang berhasil dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan, salah satunya adalah Gabungan Organisasi Wanita yang ada di salah satu wilayah Indonesia yaitu Lomok Timur. Gabungan Orngnaisasi Wanita adalah gabungan dari berbagai organisasi wanita. Gabungan organisasi wanita ini berhasil melakukan proses pemberdayaan perempuan dengan berbagai program antara lain, pemberian modal usaha perempuan, seminar dan pelatihan, pemberian bantuan dana untuk organisasi-organisasi perempuan, studi banding dan membangun jaringan. Memang tidak secara nyata kelihatan bahwa program-program organisasi ini berdampak kepada kasetaraan gender namun gabungan orgnaisasi wanita ini cukup mampu memberdayakan perempuan.²⁰ Contoh keberhasilan lain dari organiasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan adalah dari Nagari Canduang Koto Laweh, dimana organiasi perempuan memiliki program program, peningkatan pendidikan dan ketrampilan, peningkatan kesehatan perempuan, kesejahteraan keluarga dan pendidikan akhlak.²¹

¹⁶ Muhadjir Darwin, Gerakan Perempuan di Indoensia Dari Masa Ke Masa, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 7, No. 3, 2004, 283-294, p. 289-290.

¹⁷ Lilik Aslichati, Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol.7, No. 1, Maret 2011, 1-7, p. 2.

¹⁸ Lilik Aslichati, Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol.7, No. 1, Maret 2011, 1-7, p. 6.

¹⁹ Pinky Saptandari, Pemetaan Kekuatan Organisasi Perempuan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Pranata Lokal, Prosiding Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA I Makassar 2000, 288-295, p. 289-290.

²⁰ Dewita Harhanti & Huldya Syamsiar, Pemberdayaan Perempuan Dalam Organisasi (Studi Kasus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lomok Timur, Jurnal Educatio, Vol. 11, No. 1, Juni 2016, 1-15, p. 8-12.

²¹ Tiara Tane, Fatmariza, Peran Organisasi Perempuan dalam Pembangunan : Studi di Nagari Canduang Koto Laweh, Journal of Civic Education, Vol. 3 No. 4 2020, 367-375, p.374.

PENUTUP

Ada dua aspek yang berpengaruh terhadap munculnya organisasi perempuan di Indonesia, yaitu perkembangan konteks global terkait dengan isu kesetaraan gender dan mulai berkembang dan bertumbuhnya kesadaran perempuan Indonesia terkait dengan struktur yang tidak adil atau bahkan menindas. Secara sukarela perempuan mengorganisasi diri untuk mengatasi masalah tersebut dan bahkan lebih dari itu memberi kontribusi terhadap bangsa dan negara. Peran organisasi perempuan ini disambut oleh pemerintah dengan membuka kesempatan dengan membuat berbagai kebijakan terkait dengan organisasi perempuan. Karena kiprahnya yang juga dibutuhkan dalam pembangunan. Namun upaya pemerintah dan keinginan perempuan untuk menjadikan organisasi perempuan sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender tidak selalu berada pada arah yang positif, karena dengan banyaknya organisasi perempuan dan lamanya organisasi perempuan berkiprah di masyarakat tidak memberikan dampak nyata pada kesetaraan gender. Hal ini karena kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu khususnya sejak Orde Baru telah menempatkan dan memaknai organisasi perempuan hanya secara simbol dan *ceremonial* semata bahkan cenderung menjadikan organisasi perempuan ini sebagai wadah melanggengkan peran domestik perempuan. Organisasi perempuan akan memiliki dampak yang efektif terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender jika tidak terjebak dalam kegiatan dan tujuan yang justru mempertajam peran domestik sebagai istri saja. Tetapi organisasi perempuan akan mampu menciptakan kesetaraan gender jika memiliki fokus dan tujuan memberdayakan perempuan, melakukan fungsi pendidikan dan penyadaran kepada kaum perempuan tentang kesetaraan gender, berupaya membongkar struktur yang tidak adil, menjadikan permasalahan-permasalahan perempuan sebagai fokus kegiatan dan agenda organisasi, berjejaring dan mengenal gerakan perempuan di skala global.

DAFTAR RUJUKAN

- Amar, Syahrul, *Perjuangan Gender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX*, Fajar Histeria, Vol. 1, No.2, Desember 2017, 105-119.
- Aslichati, Lilik, *Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol.7, No. 1, Maret 2011, 1-7.
- CATAHU 2020 Komnas Perempuan : *Lembar Fakta dan Point Kunci 2021*, Komnas Perempuan, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. Diakses 26 April 2021, jam : 11:22 PM.
- Darwin, Muhadjir, *Gerakan Perempuan di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 7, No. 3, 2004, 283-294.
- Floretta, Jasmine, *Empat Fase Gerakan Perempuan Indonesia dan Apa Yang Bisa Kita Pelajari Darinya*, MAGDALENE, 17 Desember 2020, <https://magdalene.co/story/4-fase-gerakan-perempuan-di-indonesia-dan-apa-yang-bisa-kita-pelajari-darinya#>.
- Harthanti, Dewita & Syamsiar, Huldiya, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Organisasi (Studi Kasus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lomnok Timur*, Jurnal Educatio, Vol. 11, No. 1, Juni 2016, 1-15.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, Rifka Nissa Women Crisis Center & Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Mone, R, Batilmurik, R & Rohi, A, *Peran Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Tenaga Keperawatan Pada Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang*, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), 912) 2, Desember 2020, 79-86.
- Mursidah, *Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia dan Bingkai Sejarah*, MUWAZAH, Volume. 4, Nomor. 1, Juli 2012, 87-103.

Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020.

Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender 2018 (Kajian Lanjutan 2), Badan Pusat Statistik, 2019.

Saptandari, Pinkyi, *Pemetaan Kekuatan Organisasi Perempuan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Pranata Lokal*, Prosiding Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA I Makassar 2000, 288-295.

Sciortino, Rosalia, *Meuju Kesehatan Madani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Suryochondro, Sukanti, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, Rajawali dan Yayasan Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 1984.

Tane, Tiara & Fatmariza, *Peran Organisasi Perempuan dalam Pembangunan : Studi di Nagari Canduang Koto Laweh*, Journal of Civic Education, Vol. 3 No. 4 2020, 367-375.